



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
DINAS PERKIMTAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023**



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun untuk mengetahui pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Seiring dengan berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mewujudkan tekad bahwa Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan diseluruh Wilayah Negara Indonesia diharapkan dapat sesuai dengan kondisi, potensi, perkembangan dan tuntutan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Government*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*), dalam pelaksanaannya harus didukung administrasi yang akuntabel, handal dan dapat dipercaya.

Dinas PERKIMTAN dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja dimana semua SKPD wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo. Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas PERKIMTAN dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas–tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang akan lebih terarah dan tepat sasaran.

Purworejo, Januari 2024

Kepala Dinas PERKIMTAN
Kabupaten Purworejo



Eko Paskiyanto, A.Pi,MM.
Pembina Tk.I

NIP.196705151991031017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan	1
B. Maksud dan Tujuan	
C. Dasar Hukum	2
D. Profil Organisasi	
E. Isu Strategis	
	12
F. Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo	18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

	20
A. Visi dan Misi	20
B. Tujuan dan Sasaran	21
C. Perjanjian Kinerja	22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	25
A. Analisis dan Capaian Kinerja	25
B. Realisasi Anggaran	28

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

- 1) SK TIM Penyusunan LKjIP
- 2) Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023
- 3) IKU Perangkat Daerah.
- 4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 dan DPA 2023
- 5) Laporan Realisasi Kemajuan Fisik Kabupaten Purworejo Tahun 2023
- 6) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023
- 7) RKA dan Keselarasan.

IKTHISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Teknis yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

Tahun 2022 -2026 melaksanakan misi Bupati Terpilih yaitu misi ke tiga, keempat dan kelima.

Visi Bupati III mempunyai tujuan "Peningkatan Peretumbuhan Ekonomi"

Misi ke IV "Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia " dan Misi ke V mempunyai tujuan Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi"

Berdasarkan hasil telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo terpilih periode 2021-2024, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengimplementasikan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun, sesuai yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

Pelaksanaan kinerja Dinperkimtan pada tahun anggaran 2023 dikatakan berhasil sesuai target, sehingga bisa diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan tahunan SKPD untuk meningkatkan kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan target sangat tergantung pada faktor penunjang berupa ketersediaan anggaran dan sumberdaya manusia. Terdapat kegiatan Kemiskinan Ekstrim yang terakomodir pada Program Kawasan Permukiman, yaitu Pelaksanaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan juga kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, setelah selesainya kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan.

Dari sini akan bisa disampaikan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan dari 7 Program dan 14 Kegiatan serta 33 sub kegiatan, rata-rata sudah mencapai 100% untuk urusan wajib, sedangkan untuk urusan pilihan di Bidang Perumahan Permukiman dapat dilaksanakan, meski ada satu program yang kinerjanya dibawah 95% akan tetapi itu sifatnya sangat kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 tidak menjumpai hambatan yang berarti selama pengalokasian anggaran sudah sesuai rencana, sebagaimana bisa dilihat pada isi laporan ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

“Purworejo berdaya saing 2025”.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Terpilih.

Guna mencapai Visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah Misi III (tiga), Misi IV (empat) dan Misi V (lima).

Misi ke III (tiga) memiliki tujuan **Peningkatan pertumbuhan ekonomi** yang keberhasilannya diukur dengan indikator angka *Pertumbuhan Ekonomi* (PE) dan didukung sasaran *Meningkatnya PDRB Per Kapita* yang diukur melalui indikator PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi dari berbagai sektor, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo yaitu pada Program Daerah Program Peningkatan Investasi dengan indikator pertumbuhan nilai investasi.

Misi ke IV (empat) memiliki tujuan untuk **mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia** yang diukur keberhasilannya melalui indikator *Indeks Reformasi Birokrasi* (IRB) dan didukung sasaran *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima* yang diukur melalui indikator *Indeks Pelayanan Publik*.

Misi ke V (lima) memiliki tujuan untuk **meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi** yang diukur keberhasilannya melalui indikator *indeks infrastruktur daerah*.

Dengan teridentifikasinya Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka selanjutnya akan timbul beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan kepala daerah tersebut, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat
Layanan Kinerja Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo Terhadap
Visi Misi Kepala Daerah

No	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas infra struktur layanan dasar	Pembangunan RTLH mengandalkan sumber pendanaan dari APBN maupun APBD Provinsi	Banyaknya intervensi program pembangunan RTLH baik APBN maupun APBD Provinsi melalui Program DAK Perumahan, Bankeu Pemdes.
		Readiness Criteria yang tidak bisa dipenuhi oleh calon pemanfaat misalnya tidak mempunyai sertifikat tanah milik sendiri	
		Adanya ketentuan bahwa penerima RTLH harus masuk dalam DTKS, yang tidak setiap saat datanya bisa di up date	
2.	Meningkatnya investasi daerah	Belum adanya kepastian hukum hak atas tanah untuk investasi	Tingginya animo masyarakat untuk berinvestasi di Kawasan border city
		Belum adanya sinkronisasi dan keselarasan antara regulasi di tingkat pusat dan daerah/peraturan yang saling tumpang tindih	Kemudahan berinvestasi melalui One Single Submission (OSS)
		Investasi sering terkendala adanya sengketa lahan	1. Tertib Hukum 2. Status tanah yang jelas

B. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Purworejo

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan nasional kedalam kontribusi Kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo mengacu kepada Tujuan Jangka Menengah Daerah “Meningkatnya Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, sehingga ditetapkan Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan indicator Indeks Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
2. Peningkatan tertib administrasi pertanahan, dengan indicator indeks tertib administrasi pertanahan

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan indicator persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan Kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
2. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dengan indicator persentase peningkatan kapasitas hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Adapun untuk tujuan dan sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dapat dilihat dalam **tabel 4.1 (tabel T-C 25)**.

Tabel 4.1 (tabel T-C 25)
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,32%	89,32%	90,5%	91%	91,5%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89,32	89,82	90,5	91	91,5
2	Peningkatan Akses Perumahan Layak yang Berasal dari Pengembang		Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akses perumahan Layak yang berasal dari Pengembang	Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo	17%	40%	61%	78%	100%
3	Peningkatan tertib administrasi pertanahan		Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	17%	40%	61%	78%	100%
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan	80,06%	81,42%	88,31%	84,23%	85,21%

			untuk kepentingan umum					
4	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	90,20%	91,20%	92,20%	93,20%	94,20%
		Meningkatnya akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH)	Persentase capaian penanganan kawasan kumuh	90,70%	93%	95%	97%	100%
		Meningkatnya capaian penanganan kawasan kumuh	Persentase akses perumahan terhadap PSU yang layak	90.70%	93%	95%	97%	100%
		Meningkatnya akses perumahan terhadap layanan PSU yang layak	Persentase akses perumahan terhadap PSU yang layak	35%	45%	62%	78%	95%

Berdasarkan tabel indikator tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

Indikator ini dengan target capaian akhir periode sebesar 90,20% diharapkan sebagai tahapan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur bidang perumahan dan pemukiman.

2. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Indikator ini dengan target capaian akhir periode sebesar 85,21% diharapkan sebagai tahapan dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola administrasi pertanahan. Dengan indikator tersebut diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purworejo dalam rentang waktu lima tahun ke depan dapat ikut mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Penetapan kinerja ini merupakan janji terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, tingkat program maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja tahun 2023 serta indikator kinerja dan target kinerja adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Bupati dengan Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
2	Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana ,dan Utilitas Umum	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat ,dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	81% 81,42%
3	Meningkatnya kapasitas hukum atas sebidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Indeks tertib administrasi pertanahan Persentase peningkatan kapasitas hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	100% 100%

**Perjanjian Kinerja Kepala Bidang/Sekretaris dengan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo**

No	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Cakupan Layanan Belanja Pegawai Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100% 100%
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah	100%
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	8,98%
4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.	100%
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).	100%
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	100%
7	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Persentase Permohonan Izin membuka Tanah Negara Yang Disetujui	100% 100%

Perjanjian Kinerja Sekretaris/Kabid dengan Kasubbag/Kasi
Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah.	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan /material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
4	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
		2.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
		3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
7	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi progam kabupaten/kota	Identifikasi lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Laporan Pendataan Identifikasi Lahan Potensial	1 dokumen
8	Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi progam kabupaten/kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana . Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi progam kabupaten/kota	Rumah Korban Bencana Yang di Rehab PSU Yang Terbangun Bagi Korban Bencana	1 paket
9	Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan /atau rumah khusus	Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa Laporan Penatausahaan	12 bulan

		2.penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan /atau rumah khusus	Rusunawa persemester	
10	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen
11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 Laporan
12	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah kabupaten/kota	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	263 Unit
13	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen
		Penyediaan prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian.	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	

		Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	
14	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	100%
15	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah. Pengendalian pemanfaatan tanah negara	Persentase permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Alat ukur yang digunakan adalah tabel target PK Tahun 2022 dan Realisasi PK Tahun 2023.

Catatan intepretasi : **Tercapai(O)** warna hijau, jika realisasi lebih besar dari target ($\geq 100\%$); **Akan Tercapai (=>O)** warna kuning, jika realisasi $\geq 90\%$ s.d. 100% dari target dan; **Tidak Tercapai (<)** warna merah, jika realisasi $< 90\%$ dari target.

- 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- a) Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022).

Alat ukur yang digunakan adalah Tabel Realisasi Kinerja 2023 dan Tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022).

Catatan interpretasi:

Relevan warna hijau, jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trendnya **sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022) (Realisasi Kinerja Tahun 2023 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja 2021 dan 2022).

Tidak Relevan warna merah, jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trendnya **tidak sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022) (Realisasi Kinerja Tahun 2023 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2021 dan 2022).

- b) Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022)

Alat ukur yang digunakan adalah Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2021 dan 2022

Catatan interpretasi:

Efektif warna hijau, jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trendnya **sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022).
Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2023 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2021 dan 2022) dan;

Tidak Efektif warna merah, jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trendnya **tidak sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2023).
Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2023 lebih kecil dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2021 dan 2022)

- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi PK Tahun 2023, target Tahun 2023 pada RPJMD 2021-2026 dan Target akhir tahun Tahun 2023 pada RPJMD 2021-2026.

Catatan interpretasi:

- a) **Tercapai(O)** warna hijau, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun 2022);
- b) **Akan Tercapai(=>0)** warna kuning, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target tahun 2023 tetapi dibawah target akhir tahun Tahun 2023;
- c) **Tidak Tercapai(<)** warna merah, jika realisasi tidak tercapai sesuai target tahun 2023.

4) Perhitungan capaian kinerja sasaran strategis

Catatan intepretasi:

- a) **Tercapai(O)** warna hijau, jika semua (100%) IKU sasaran strategis tercapai;
- b) **Akan Tercapai (=>0)** warna kuning, jika rata-rata nilai IKU sasaran strategis $\geq 90\%$
- c) **Tidak Tercapai(<)** warna merah, jika rata-rata nilai IKU sasaran strategis $< 90\%$.

5) Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Daerah

Rumus Nilai capaian kinerja Pemerintah Daerah (N-LkjIP) =

(Jumlah Sasaran Strategis berstatus Tercapai + Akan Tercapai)

Jumlah Sasaran Strategis

Hasil penilaian kinerja N-LKjIP, dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

- a) $90\% > N-LKjIP \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik
- b) $80\% > N-LKjIP \leq 90\%$ dikategorikan Baik
- c) $60\% > N-LKjIP \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
- d) $50\% > N-LKjIP \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
- e) $N-LKjIP \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang

Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja Tahun 2023			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	0
2	Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Indeks Infra Struktur Perumahan dan Permukiman				

3		Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	100%	0
	Meningkatnya kapasitas hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Indeks tertib administrasi pertanahan	100%	100%	100%	
		Persentase peningkatan kapasitas hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	100%	100%	100%	0

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah tangga yang memepati perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
				%	0%	%	%	%	%	%	%	%						
			0															
			100%															
			100%															
			100%															
			=>0															
			Capaian 2023 terhadap Standar Nasional															

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Sasaran strategis 1 ini bertujuan untuk **“Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”** dan merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi yang diukur keberhasilannya melalui indikator infrastruktur daerah”** dinilai berhasil (**Tercapai=100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)” Tercapai (100%)**.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan Sasaran Strategis **“Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat ”**disebabkan :

- 1) Komitmen yang tinggi dari pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana prasarana dasar yang layak dengan pendanaan yang memadai dari berbagai sumber dana (DAK, DAU).
- 2) Adanya komitmen dan kerjasama yang tinggi antara stakeholder dengan semua pihak terkait.
- 3) Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 9,715% atau sebesar Rp.1.875.663.800- dari anggaran sebesar Rp.19.307.122.935,- digunakan sebesar Rp.18.658.963.211-.

c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Efisiensi anggaran sebagai bentuk efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai target IKU dan sasaran strategis.

Aspek urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pendukung utama untuk keberhasilan pencapaian kinerja perlu ditingkatkan.

Tabel 3.39. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2016)	Kinerja Tahun 2021			Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
2	Meningkatnya kapasitas hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.	Persentase peningkatan kapasitas hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.	100%	100	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		
				0												
				100%												
				100%	Relevan											
				100%	Efektif											
			=>0													
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional														

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Sasaran strategis 2 ini bertujuan untuk **“Peningkatan pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi yang keberhasilannya diukur dengan indikator angka Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan didukung sasaran Meningkatnya PDRB Perkapita yang diukur yang diukur melalui indikator PDRB perkapita. Pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi dari berbagai sektor, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo yaitu Progam Daerah Progam Peningkatan Investasi dengan indicator pertumbuhan nilai investasi.”** dan merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, industri sertapotensi pariwisata dan seni budaya.** Sasaran **“Meningkatnya PDRB Per Kapita ”** dinilai berhasil (**Tercapai=100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Persentase peningkatan kapasitas hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan kriteria Tercapai (100%).**

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan Sasaran Strategis **“Meningkatkan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan”**disebabkan :

- 1) Kerjasama yang baik dengan BPN dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian konflik pertanahan.
- 2) OPD Teknis melakukan pengadaan tanah secara mandiri karena luasan tanah yang diadakan menjadi kewenangan OPD Teknis yang memerlukan tanah tersebut.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4,68% atau sebesar Rp.12.860.000,-dari anggaran sebesar Rp.261.886.936,-digunakan sebesar Rp257.068.236.,-

c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Keberhasilan sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan yang dikelola oleh OPD DINPERKIMTAN.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih fokus dalam penanganan masalah pertanahan khususnya tanah GG di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten Purworejo.

B. Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, implementasi Strategis Tahun 2023 mencakup pelaksanaan 14 kegiatan, 33 sub kegiatan dalam 7 program untuk mendukung 3 sasaran strategis. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Bupati dengan Kepala Pelaksana
Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 2. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.	%	80,42% 81%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
2	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1. Persentase peningkatan kapasitas hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Indeks tertib administrasi pertanahan	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, terdapat dua sasaran strategis (100%) yang mencapai 100%. Capaian untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Jumlah Rumah Tangga yang menempati perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman, layak,sehat dan didukung oleh Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

$$Y: \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga seluruh Kabupaten}}{\text{Jumlah Rumah Tangga seluruh Kabupaten}} 100\%$$

$$Y = \frac{3}{3} 100\%$$

$$Y = 100\%$$

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Definisi operasional meningkatnya hubungan kinerja perangkat daerah adalah prosentase dukungan terhadap kinerja perangkat daerah dengan formula penghitungan sbb :

$$Y = \frac{\text{Jumlah program yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah program yang seharusnya dilaksanakan}} 100\%$$

Jumlah program yang direncanakan dan dapat dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 7 program, berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Progam Pengembangan Perumahan.
3. Progam Kawasan Permukiman.
4. Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
5. Progam Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
6. Progam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
7. Progam Pengelolaan Izin Membuka Tanah

$$Y = \frac{\text{Jumlah program yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah program yang seharusnya dilaksanakan}} 100\%$$

$$Y = \frac{7}{7} 100\%$$

$$Y = 100\%$$

**Capaian Kinerja Sasaran
Dinperkimtan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Persentase Capaian
1	Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %

Capaian kinerja sasaran tahun 2023 mampu mencapai 100% pada dua sasaran strategis. Apabila dilihat dari data sebelumnya, ternyata pencapaian kinerja Dinperkimtan sudah seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan capaian Kinerja dari tahun 2022-2023 :

Capaian Kinerja Sasaran
Dinperkimtan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi 2023	Capaian2023
1	Terpenuhinya cakupan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %

Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja Sasaran
DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo

Tahun 2023

No	Sasaran	Program	Kegiatan	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	
			5 Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	
			2 Program Pengembangan Perumahan.	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota
				3 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.
			3 Program Kawasan	1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

No	Sasaran	Program	Kegiatan
	oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Permukiman	2 dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
		4 Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan	5 Progam Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		6 Progam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		7 Progam Pengelolaan Izin Membuka Tanah	1 Penerbitan Izin Membuka Tanah

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dikelompokkan berdasar sasaran strategis, berdasar program dan berdasar kegiatan. Berikut tabel realisasi sesuai pengelompokan dimaksud.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Dinperkimtan Kabupaten Purworejo
Tahun2023

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
1	Pendapatan Asli Daerah	89.700.000	96.380.000	107,45
	a. Pendapatan Retibusi Daerah	89.700.000	79.575.000	88,71
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	16.805.000	
2	Belanja Operasi :	14.908.828.643	14.216.503.561	95.36
	a. Belanja Pegawai	2.943.263.051	2.728.902.156	92,72
	b. Belanja Barang	1.795.565.592	1.725.530.765	96,10
	c. Belanja Hibah	5.200.000.000	5.080.000.000	97,69
	d. Belanja Bantuan Sosial	4.970.000.000	4.682.070.640	94,21
3	Belanja Modal	4.487.994.292	4.442.059.650	98,98
	a. Belanja Peralatan dan Mesin	0	0	0
	a. Belanja Bangunan dan Gedung	197.377.000	195.517.800	99,06
	b. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.290.617.292	4.246.541.850	98,97

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Dinperkimtan Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja Sasaran	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Anggaran Rp	Efisiensi Anggaran Rp	Kinerja Keuangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	3.456.302.551	3.230.035.195	180.105.154	93,45%
2	Terpenuhinya cakupan perumahan dan Kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, sehat dan didukung oleh Prasarana, Sarana	100%	1.955.691.372	1.853.550.692	6.379.130	94,78%

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran	Kinerja Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100%	3.345.302.551	Rp.3.230.035.195	180.105.154	93,45%
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyelesaian rumah layak	%	100%	1.955.691.372	Rp.1.860.275.692	6.379.130	95,12 %

		huni							
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas Kawasan kumuh 0-10 ha yang ditangani Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh di kabupaten	%	100%	363.235.900	Rp.354.072.870	2.752.500	97,48 %	
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentas pengurangan rumah tidak layak huni adiliuar kawasan kumuh	%	100%	4.265.095.000	Rp.4.035.131.388	1.790.095.000	94,61 %	
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	%	100%	9.122.164.692	Rp.8.960.893.220	59.659.408	98,23%	

		<p>dan Utilitas Umum (PSU).</p> <p>2. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.</p>					
3	<p>Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan kepentingan</p>	<p>1. Persentase peningkatan kapasitas hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.</p> <p>2. Indeks tertib administrasi pertanahan</p>	100%	234.333.420	218.154.846	31.250.316	93,42%

Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Diperkimtan Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	% kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran	% Kinerja Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	28.497.400	25.555.600	0	89,68
2	Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	2.953.702.951	2.739.117.056	21.123.866	92,74
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	97.342.600	97.270.500	100.000	99,93

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	65.517.800	9.929.959	0	91,47
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	311.241.800	308.162.080	202.229.020	99,162
7	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah.	100	38.000.000	26.922.000	2.000.000	70,85
8	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100	1.619.526.000	1.583.306.340	474.000	95,36
9	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah	1. Persentase jumlah rumah susun,	100	257.361.372	250.047.352	3.905.130	97,16

6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	100%	100%	88.691.252	Rp.84.051.421	22.750.216	94,77%
7	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui	100%	100%	145.642.168	Rp.134.103.425	8.500.100	92,08%

	Khusus	rumah khusus yang terbina						
11	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase luas Kawasan kumuh 0-10 ha yang ditangani. 2. Persentase pengurangan luasan Kawasan kumuh di kabupaten 	100	61.850.000	58.444.950	13.150.000	94,49	
12	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	Persentase pengurangan luasan Kawasan kumuh di kabupaten		301.385.900	295.627.920	15.902.500	98,09 %	
13	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh	100	4.265.095.000	4.035.131.388	1.790.095.000	94,61	
14	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas	100	9.122.164.692	8.960.893.220	59.659.408	98,23	

		Umum)						
15	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	100	88.691.252	84.051.421	22.750.216	99,89	
16	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui	100	145.642.168	134.103.425	8.500.100	97,38	

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2023 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran adalah 96,19% .dibulatkan menjadi 100%

Dari jumlah 3 sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2023 ketiganya mampu mencapai target sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strartegis 2021-2026, dalam Rencana Kerja 2023 dan telah ditandatangani antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kepala Daerah yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

B. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2023 kinerja berdasarkan Renstra 2021-2026, Rencana Kerja 2023 dan berdasar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sudah bagus, mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, kontribusi kegiatan terhadap pencapaian SPM belum secara khusus dialokasikan pada target kinerja kegiatan, sedangkan pencapaian SPM tercapai 100%, oleh karena itu kinerja di tahun mendatang perlu ditingkatkan agar kontribusi pencapaian SPM lebih besar terutama pada kegiatan yang outputnya memberi kontribusi terhadap pencapaian SPM, yaitu :

1. Perlu lebih mengefektifkan atau mengoptimalkan sarana kerja dan sumberdaya manusia yang sudah ada
2. Membuat sistem perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan dengan instansi terkait
4. Mengintensifkan pelaksanaan tindak lanjut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang ada.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

JL. Pahlawan No.2 Purworejo - 54171

Telp : [0275] 322247 Fax : [0275] 3128726 E.Mail : dinperkimtan@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUS BASTIAN

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

PIHAK KEDUA †


AGUS BASTIAN

PIHAK PERTAMA


EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 196705151991031017



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANJARAN

Jalan Pahlawan No. 2 Purworejo 54171

Telepon: (0275) 322247, Faximile: (0275) 3125725

Laman: dinperkimtan.purworejokab.go.id; Pos-el: dinperkimtan.purworejokab@gmail.com

PENYUSUNAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM) SEMESTER I
DINPERKIMTAN KAB. PURWOREJO
TAHUN 2023